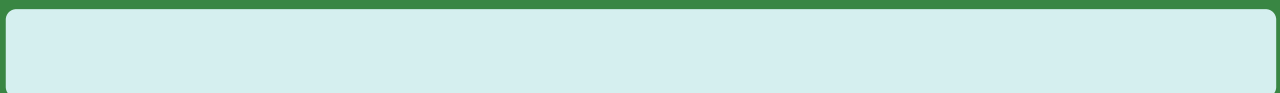




LAPORAN ANALISIS PBBKB Tahun 2026



KATA PENGANTAR



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, mengamanatkan bahwa untuk memenuhi kinerja tertentu sektor pendapatan pajak daerah, salah satunya menyusun Profil Wajib Pajak Daerah. Dokumen Profil Wajib Pajak Daerah ini memberikan gambaran mengenai potensi dan karakteristik daerah Sumatera Selatan dengan sektor unggulan yang menjadi peta bagi calon investor dalam melakukan investasinya di Sumatera Selatan.

Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berdasarkan data realisasi, merupakan penerimaan yang paling dominan sektor pajak daerah. Upaya yang terus ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan pendapatan PBBKB dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan memberikan insentif fiskal untuk mendorong pertumbuhan investasi daerah, baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga dapat meningkatkan faktor produksi perekonomian yang berdampak positif pada peningkatan konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan.

Sinergi dan kolaborasi bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan terus ditingkatkan dalam rangka pengembangan wilayah untuk Sumatera Selatan Terus Maju Untuk Semua. Dengan pola bagi hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan turut menerima manfaat untuk pembangunan daerah yang pada akhirnya untuk mensejahterakan masyarakat.



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMIMPIN UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001

DAFTAR ISI



Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
TIM PENYUSUN.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. LATAR BELAKANG	1
II. DASAR HUKUM	5
III. MAKSUD DAN TUJUAN	6
IV. RUANG LINGKUP.....	6
V. SISTEMATIKA PENULISAN	6
 BAB II GAMBARAN UMUM	 8
I. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	8
II. STRUKTUR PEREKONOMIAN DAERAH.....	9
III. INVESTASI DAERAH	14
IV. PERKEMBANGAN SUKU BUNGA	19
V. PENERIMAAN DAERAH DARI SEKTOR PBB-KB	21

BAB	III	METODOLOGI.....	25
	I.	RUANG LINGKUP.....	25
	II.	JENIS DAN SUMBER DATA.....	26
	III.	TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	26
	IV.	POPULASI DAN SAMPEL.....	26
	V.	DEFINISI OPERASIONAL.....	27
	VI.	TEKNIK ANALISIS.....	28
		1. Common Effect Model (CEM).....	29
		2. Fixed Effect Model (FEM)	29
		3. Random Effect Model (REM).....	29
		4. Uji Stationeritas	30
		5. Pemilihan Model Terbaik.....	31
		6. Uji Chow	31
		7. Uji Hausman	31
		8. Uji Lagrange Multiplier (LM).....	32
		9. Uji Palanggaran Asumsi.....	32
		10. Uji Multikolinearitas	32
		11. Uji Heteroskedastisitas.....	33
		12. Uji Autokorelasi	33
BAB	IV	ANALISIS DATA.....	35
	I.	STATISTIK DESKRIPSI.....	35
	II.	MULTIKOLENIARITAS.....	36
	III.	UJI AKAR UNIT	37
	IV.	UJI PELANGGARAN ASUMSI.....	38
		1. Uji Heteroskedastisitas	38
		2. Uji Ketergantungan Silang	39
		3. Uji Lagrange Multiplier (LM)	40
		4. Uji Autokorelasi.....	40
		5. Uji Normalitas	40
	V.	PEMILIHAN KRITERIA MODEL.....	41
		1. Hasil Uji Chow	41

2. Hasil Uji Hausman	42
VI. MODEL REGRESI	43
VII. HASIL ESTIMASI MODEL AKHIR	45
VIII. PENGUJIAN KOEFISIEN STATISTIK	47
IX. PENGUJIAN t STATISTIK	48
X. KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)	49
XI. STABILITAS MODEL	49
XII. HASIL PEMBAHASAN	50
1. Hubungan Antara PDRB Terhadap PBBKB	50
2. Hubungan Antara Investasi Daerah Terhadap PBBKB	51
3. Hubungan Antara Suku Bunga Terhadap PBBKB	52
BAB V KESIMPULAN	
LAMPIRAN	
1. DAFTAR REFERENSI	

DAFTAR TABEL



Halaman

TABEL	1.1	Capaian Kinerja Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025.....	1
TABEL	2.1	Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap Pembentuk PDRB.....	10
TABEL	2.2	Perkembangan PDRB Provinsi Sumatera Selatan.....	12
TABEL	2.3	Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	16
TABEL	2.4	Nilai Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)	18
TABEL	2.5	Realisasi Penerimaan PBB-KB.....	23
TABEL	3.1	Definisi Operasional Variabel	27
TABEL	4.1	Hasil Pengujian Statistik Deskripsi.....	35
TABEL	4.2	Multikoleniaritas.....	36
TABEL	4.3	Hasil Pengujian Akar Unit	38
TABEL	4.4	Hasil Pengujian Heteroskedastisitas.....	39
TABEL	4.5	Hasil Pengujian Cross Section Dependence (CD)	39
TABEL	4.6	Hasil Uji Chow	42
TABEL	4.7	Hasil Uji Hausman.....	43
TABEL	4.8	Hasil Estimasi dengan Metode CEM, FEM, dan REM.....	44
TABEL	4.9	Hasil Regresi Uji Pemilihan Model Terbaik.....	45
TABEL	4.10	Hasil Estimasi Model Akhir.....	46
TABEL	4.11	Hasil Pengujian F Statistik.....	47

DAFTAR GAMBAR



Halaman

GAMBAR	1.1	Komposisi Kontribusi Jenis Pajak Terhadap Pajak Daerah.....	1
GAMBAR	2.1	Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan	9
GAMBAR	2.2	Perkembangan PDRB Provinsi Sumatera Selatan.....	13
GAMBAR	2.3	Perkembangan Nilai Realisasi PMDN.....	17
GAMBAR	2.4	Perkembangan Nilai Realisasi PMA	19
GAMBAR	2.5	Perkembangan Suku Bunga.....	21
GAMBAR	2.6	Perkembangan Realisasi Penerimaan PBB-KB.....	24
GAMBAR	3.1	Kerangka Konseptual Analisis.....	28
GAMBAR	4.1	Hasil Pengujian Normalitas	41
GAMBAR	4.2	CUSUM Test dan CUSUM of Squares Test.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pendekatan kebijakan pengelolaan desentralisasi fiskal dari penerimaan daerah yang sah pertama kali diterapkan di Indonesia dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disertai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Landasan kebijakan penerapan desentralisasi fiskal daerah dari sisi penerimaan daerah provinsi seiring dengan kebijakan pada daerah otonom, yang memberikan keleluasaan untuk pemerintahan daerah dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di daerah menuju kemandirian fiskal daerah (Hung & Thanh, 2022).

Di era kemandirian fiskal daerah saat ini, terbitnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, lebih mengupayakan agar Pemerintahan Daerah lebih mandiri untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Namun dalam penerapan di Indonesia, konsolidasi fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tetap di kawal oleh Pemerintah Pusat untuk menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah dengan mengalokasikan dana transfer ke daerah (Ren et al., 2025). Strategi implementasi yang diharapkan melalui kebijakan desentralisasi fiskal melalui penguatan

sistem perpajakan yang dikelola Pemerintahan Daerah (*local tax ratio*), mengurangi ketimpangan dan keseimbangan fiskal vertikal dan horizontal, perbaikan kualitas belanja daerah untuk ruang kebijakan publik serta sinergi, kolaborasi dan harmonisasi belanja antara pusat dan daerah (Hang & Pham, 2025).

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu entitas penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan penunjang pemerintahan daerah provinsi urusan keuangan sub urusan pendapatan. Sebagai entitas penyelenggara pemerintahan daerah provinsi diberikan kewenangan dalam mengelola penerimaan daerah sektor penerimaan pajak daerah sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kebijakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berumber dari Pendapatan Asli Daerah terutama yang fundamental melalui penerimaan sektor perpajakan daerah. Sumber potensi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan;
5. Pajak Alat Berat;
6. Pajak Rokok;
7. Opsi Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2025, sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor memegang peranan kontribusi terbesar yang ditunjukkan pada Tabel 1.1 berikut.

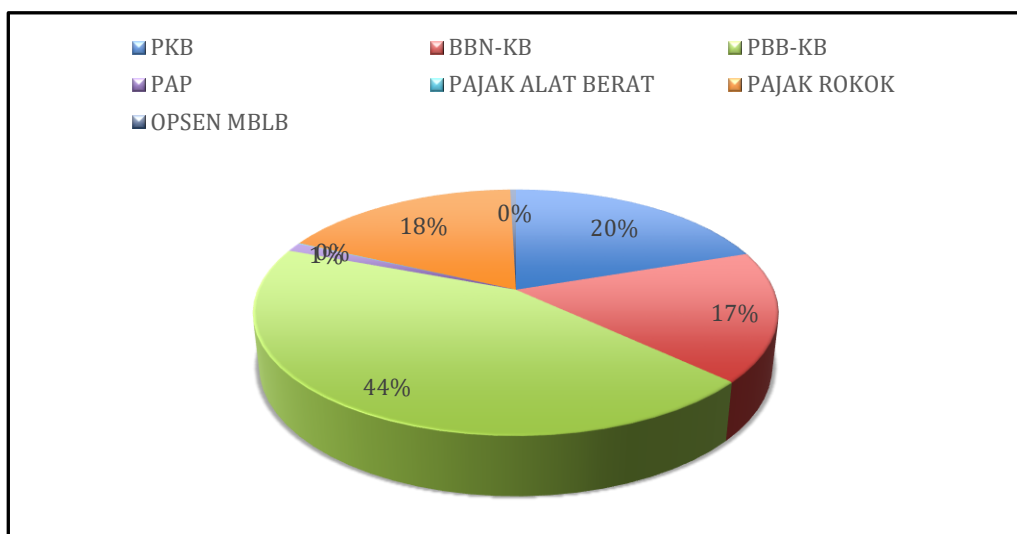
Tabel 1.1

Capaian Kinerja Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025

NO.	JENIS PAJAK	CAPAIAN KINERJA TA. 2025		
		TARGET	REALISASI	%
1.	PKB	771.441.317.847,00	778.888.270.431,00	100,97
2.	BBN-KB	797.803.083.370,00	671.258.239.000,00	84,14
3.	PBB-KB	1.473.535.793.624,00	1.719.840.624.162,49	116,72
4.	PAP	26.540.973.333,00	45.139.844.782,29	170,08
5.	PAJAK ALAT BERAT	6.000.000.000,00	3.874.594.593,00	64,58
6.	PAJAK ROKOK	730.171.774.938,00	692.337.957.922,00	94,82
7.	OPSEN MBLB	27.874.543.495,00	16.506.805.333,05	59,22
JUMLAH		3.833.367.486.607,00	3.927.846.336.223,83	102,46

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, kinerja pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mencapai capaian realisasi sebesar 116,72 %, mengalami surplus sebesar Rp. 246.304.830.538,49. Perbandingan komposisi kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap pajak daerah tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 1.1 berikut.



Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Gambar 1.1

Komposisi Kontribusi Jenis Pajak Terhadap Pajak Daerah

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas, kontribusi jenis pajak terhadap pendapatan Pajak Daerah tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berkontribusi sebesar 20 %;
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) berkontribusi sebesar 17 %;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) berkontribusi sebesar 44 %;
4. Pajak Air Permukaan (PAP) berkontribusi sebesar 1 %;
5. Pajak Alat Berat (PAB) berkontribusi sebesar 0,1 %;
6. Pajak Rokok berkontribusi sebesar 18 %; dan
7. Opsen MBLB berkontribusi sebesar 0,42 %

Pengelolaan pajak daerah ini memainkan 2 (dua) peran yang saling menguatkan, antara potensi penerimaan daerah dari sektor perpajakan maupun dari sisi insentif fiskal daerah untuk memberi dukungan pada perkembangan investasi di daerah. Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi rasio pajak daerah provinsi dengan total penerimaan yang sah dari perekonomian daerah provinsi, nilai rasio pajak daerah provinsi yang diukur dengan local tax ratio yaitu rasio antara realisasi penerimaan pajak daerah provinsi dengan total penerimaan yang sah dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah provinsi, nilai rasio penerimaan pajak daerah provinsi merupakan angka rasio antara pajak daerah provinsi yang diterima sesuai amanat kewenangan dengan PDRB, angka rasio penerimaan pajak daerah provinsi dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi ekspansi atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga (Sugiyarto et al., 2025).

II. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya profil wajib pajak PBB-KB:

1. Pemenuhan data bukti dukung atas kinerja tertentu melalui kegiatan pemungutan pajak daerah;
2. Memberikan gambaran kondisi wajib pajak PBB-KB Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan karakteristik daerah;
3. Memberikan gambaran pemetaan potensi pendapatan pajak PBB-KB berdasarkan investasi daerah;
4. Sebagai updating data dan inventarisasi wajib pajak PBB-KB.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan profil wajib pajak daerah ini dibatasi pada wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

V. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan pelaporan penyusunan profil wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup pembahasan serta sistematika penulisan penyusunan profil wajib pajak PBB-KB;
- BAB II GAMBARAN UMUM, menjelaskan mengenai gambaran umum cakupan wilayah wajib pajak PBB-KB, struktur perekonomian, investasi daerah, kondisi suku bunga;
- BAB III METODOLOGI, menjelaskan mengenai metodologi penyusunan profil wajib pajak PBB-KB antara lain ruang lingkup, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, kerangka konseptual pemikiran, definisi operasional;

BAB IV ANALISIS DATA, menjelaskan mengenai hasil analisis data mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan di sektor pajak PBB-KB;

BAB V KESIMPULAN, menjelaskan mengenai kesimpulan dari penyusunan profil wajib pajak PBB-KB

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. DAFTAR REFERENSI



BAB II

GAMBARAN UMUM

I. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Provinsi Sumatera Selatan secara peta administrasi memiliki luas wilayah seluas 94.770,15 km² yang terdiri dari cakupan wilayah daratan dengan luas sekitar 86.769,34 km² serta memiliki daerah perairan pesisir dengan luas sekitar 8.000,81 km². Secara district kewilyahan terdiri 17 kabupaten/kota yang terbagi menjadi 13 wilayah kabupaten dan 4 wilayah kota dengan Ibukota Provinsi berada di Kota Palembang. Secara geografis terletak pada lokasi strategis antara 1⁰25'13" – 4⁰55'7" Lintang Selatan serta 102⁰3'52" – 106⁰19'45" Bujur Timur dengan perbatasan wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan posisi rupa bumi adalah:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Jambi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Lampung
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Bengkulu
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Sumatera Selatan memiliki 241 kecamatan, 403 kelurahan serta 2.855 desa. Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki luas wilayah terbesar dengan luas sekitar 17.068,99 km² sedangkan wilayah terkecil dimiliki oleh Kota Palembang dengan luas sekitar 352,51 km². Adapun peta administrasi Provinsi Sumatera Selatan ditunjukkan oleh Gambar 2.1 berikut.



Sumber: Perda RPJMD No. 2 Tahun 2025

Gambar 2.1

Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan

II. STRUKTUR PEREKONOMIAN DAERAH

Struktur perekonomian daerah Sumatera Selatan masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam yang menjadi daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi di daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sektor yang menjadi unggulan di Sumatera Selatan berdasarkan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Konstruksi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai proxy untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi, dimana konsumsi akan produk barang dan jasa akan menjadi nilai tambah pertumbuhan ekonomi. Perkembangan kontribusi (*share*) sektor lapangan usaha menurut kelompok pengeluaran ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap Pembentuk PDRB

No.	Lapangan Usaha	Kontribusi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,17	14,71	13,08	13,10	13,56
2.	Pertambangan dan Penggalian	18,32	21,03	27,71	26,60	24,60
3.	Industri Pengolahan	19,73	19,09	17,51	17,91	18,27
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,12	0,10	0,10	0,10
6.	Konstruksi	12,53	11,92	10,67	10,69	10,80
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,71	13,47	12,97	13,40	13,85
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,35	2,12	2,21	2,46	2,50
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,87	1,81	1,77	1,91	2,01
10.	Informasi dan Komunikasi	3,29	3,21	2,91	2,90	3,00
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,39	2,38	2,08	2,07	2,13
12.	Real Estate	3,34	3,24	2,90	2,87	2,94
13.	Jasa Perusahaan	0,14	0,13	0,11	0,11	0,11
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,90	2,77	2,45	2,42	2,51
15.	Jasa Pendidikan	2,40	2,37	2,06	2,03	2,03
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,72	0,70	0,63	0,60	0,63
17.	Jasa lainnya	0,86	0,80	0,71	0,69	0,70
Total		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Sumsel (2026)

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, bahwa kontribusi lapangan usaha terhadap pembentuk nilai PDRB Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 2020 – 2024 terbesar diberikan oleh sektor Pertambangan dan Penggalian antara 18,32 % - 24,60 %, kemudian sektor Industri Pengolahan antara 17,51 % - 19,73 %, kemudian sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 13,08 % - 15,71 %, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 12,97 % - 13,85 % serta Kegiatan Kontruksi memberikan kontribusi sebesar 10,67 % - 12,53 %.

Perkembangan perekonomian jika dilihat dari PDRB pada level daerah menunjukan bahwa tingkat kekuatan daerah dalam mendorong nilai manfaat produk dalam periode waktu yang telah ditentukan. PDRB

merupakan nilai tambah kotor barang serta jasa yang dihasilkan di suatu wilayah domestik daerah yang timbul sebagai akibat adanya berbagai aktivitas perekonomian periode tertentu tanpa mempertimbangkan faktor dari hasil produksi dapat dipengaruhi oleh nilai residen atau non-residen (BPS Indonesia;2024).

Dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia, memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk memperkuat desentralisasi fiskal daerah dari sisi penerimaan pendapatan daerah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kualitas pemerintahan daerah dengan kondisi perekonomian kembali ke azas desentralisasi, yang berarti bahwa desentralisasi merupakan reformasi dari sisi kebijakan yang harus mempertimbangkan kualitas pemerintahan daerah menyerahkan wewenang (Muringani et al., 2022.). Dengan pemberian pengaturan desentralisasi fiskal pendapatan daerah melahirkan berbagai strategi dan kebijakan pemerintahan daerah untuk menggali potensi pendapatan daerah provinsi yang terstruktur pada Pendapatan Asli Daerah.

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi rasio pajak daerah provinsi dengan total penerimaan yang sah dari perekonomian daerah provinsi, nilai rasio pajak daerah provinsi yang diukur dengan *local tax ratio* yaitu rasio antara realisasi penerimaan pajak daerah provinsi dengan total penerimaan yang sah dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah provinsi, nilai rasio penerimaan pajak daerah provinsi merupakan angka rasio antara pajak daerah provinsi yang diterima sesuai amanat kewenangan dengan PDRB, angka rasio penerimaan pajak daerah provinsi dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi *ekspansi* atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga (Giorkhelidze, 2024).

Dengan kebutuhan pembiayaan dalam pembangunan yang terus meningkat untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB, pemerintahan daerah juga perlu mencari alternatif pendanaan lainnya selain dari dana transfer ke daerah. Untuk itu pemerintahan daerah dapat melakukan pola kemitraan dengan membuka peluang investasi daerah untuk tumbuh dan memberikan kontribusi pada peningkatan PDRB. Investasi daerah dapat memberikan keuntungan bagi pemerintahan daerah untuk mengatasi kesenjangan dan memberikan percepatan pelayanan publik disaat kondisi PAD yang sangat terbatas. Oleh karena itu, pemerintah harus menempuh kebijakan dan insentif baru untuk menarik investor atau jenis penanaman modal asing lainnya yang dapat menguntungkan serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif untuk mengentaskan kemiskinan (Keita & Yu, 2021). Perkembangan nilai PDRB Provinsi Sumatera Selatan ditunjukkan pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2

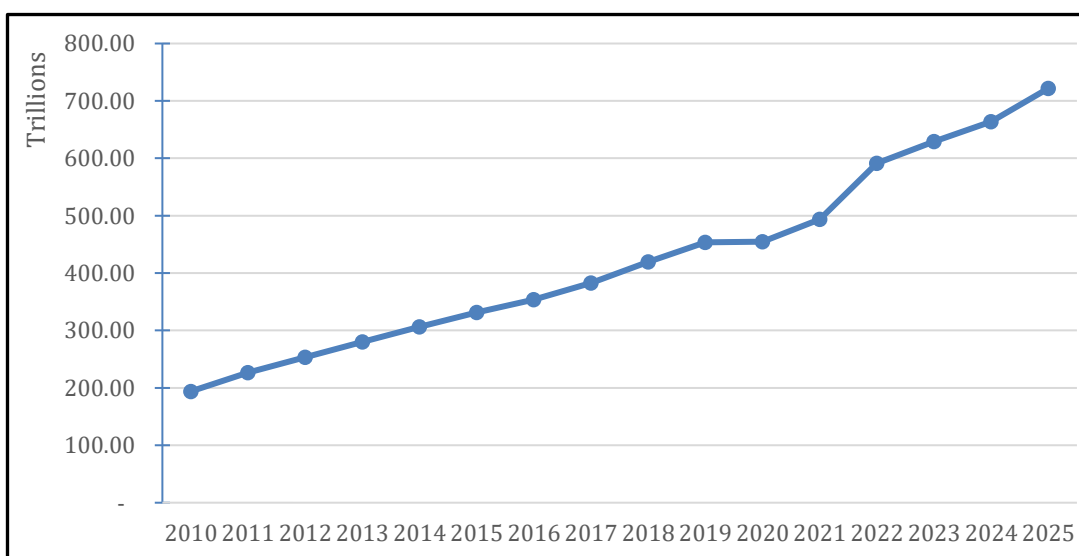
Perkembangan PDRB Provinsi Sumatera Selatan

TAHUN	PDRB ADHB [Rp. Juta]	PDB Nasional [Rp. Juta]	TINGKAT PERTUMBUHAN (%)	% PANGSA PDB
2010	194.012.970,00	6.864.133.100,00		2,83
2011	226.666.930,00	7.831.726.000,00	16,83	2,89
2012	253.265.120,00	8.615.704.500,00	11,73	2,94
2013	280.348.460,00	9.546.134.000,00	10,69	2,94
2014	306.421.600,00	10.569.705.300,00	9,30	2,90
2015	331.765.700,00	11.526.332.800,00	8,27	2,88
2016	353.866.960,00	12.401.728.500,00	6,66	2,85
2017	382.885.700,00	13.589.825.700,00	8,20	2,82
2018	419.392.160,00	14.838.756.000,00	9,53	2,83
2019	453.402.710,00	15.832.657.200,00	8,11	2,86
2020	454.607.400,00	15.443.353.200,00	0,27	2,94
2021	493.636.850,00	16.976.751.400,00	8,59	2,91
2022	591.603.480,00	19.588.089.900,00	19,85	3,02

2023	629.099.660,00	20.892.376.700,00	6,34	3,01
2024	663.961.700,00	22.138.964.000,00	5,54	3,00
2025	721.850.695,82	23.821.103.600,00	8,72	3,03

Sumber: BPS Indonesia dan BPS Sumsel, data diolah (2026)

Perkembangan nilai PDRB Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Tabel 2.2 diatas selama kurun waktu 16 tahun (2010 – 2025) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 19,85 % sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,27 %. Trend peningkatan ini ditunjukkan pada Gambar 2.2 berikut.



Sumber: BPS Sumsel (2026)

Gambar 2.2

Perkembangan PDRB Provinsi Sumatera Selatan

PDRB Provinsi Sumatera Selatan memberikan pangsa pasar terhadap PDB Nasional selama kurun waktu 16 tahun (2010 – 2025) dengan rerata berkontribusi sebesar 2,92 %.

III. INVESTASI DAERAH

Provinsi Sumatera Selatan memiliki beberapa sektor yang menjadi unggulan yang diminati oleh calon investor untuk melakukan investasi di Sumatera Selatan, berdasarkan data potensi investasi regional dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi sektor unggulan Sumatera Selatan antara lain Pertambangan. Potensi sumber daya energi Sumatera Selatan seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan panas bumi terdapatnya tersebar dan berlimpah merupakan modal dasar dalam mewujudkan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi khususnya melalui Pembangunan Ketenagalistrikan dan penyediaan energi bahan bakar dan industri. Beberapa daerah di Sumatera Selatan sebagai daerah penghasil batu bara, seperti Wilayah Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim, Muratara, OKU Selatan, Kabupaten Lahat. Dan sekarang Tambang batu bara juga terdapat di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber daya batu bara mencapai 43,85 miliar ton atau 30,5% dari total sumber daya batu bara nasional. Sedangkan cadangan batu bara di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 9,51 miliar ton atau sekitar 24,5% dari cadangan batu bara nasional. Adapun produksi batu bara Sumsel berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Selatan, yakni berkisar 50 juta ton dalam pertahun.

Sektor Perindustrian, industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 17,84 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Selatan. Kontribusi ini menempatkan sektor industri pengolahan sebagai sektor terbesar kedua setelah sektor pertambangan. Sektor industri pengolahan memiliki peran penting dalam perekonomian Sumatera Selatan, mengingat kontribusinya yang hampir mencapai seperlima dari total PDRB. Kinerja ekspor berdasarkan kelompok barang utama/sektor, sepanjang tahun 2023, nilai ekspor industri manufaktur mempunyai nilai yang paling tinggi bila dibandingkan dengan sektor migas,

pertanian dan sektor lainnya. Sepanjang tahun 2023, total ekspor produk sektor industri manufaktur di Sumatera Selatan mencapai US\$3.194,64 juta atau menyumbang 48,51 persen terhadap total ekspor Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan sektor industri manufaktur menjadi andalan Sumatera Selatan dan mampu bersaing di pasar global. Subkategori Industri yang memiliki keunggulan di antaranya Industri Makanan dan Minuman, Industri Industri Batubara dan Pengilangan Migas, Industri Karet dan Barang dari Karet dan Plastik.

Sektor Pertanian, luas panen padi pada 2023 lalu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Luas panen 2023 tercatat seluas 502,16 hektare, sementara 2022 mencapai 513,37 hektare. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.161.246 rumah tangga, naik 21,12 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 958.724 rumah tangga. Rasio Usaha Pertanian Perorangan (UTP) di Provinsi Sumatera Selatan terhadap Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) sebesar 1,02, turun 0,24 poin dari tahun 2013 yang sebesar 1,26. Sepuluh komoditas terbanyak yang diusahakan oleh Usaha Pertanian Perorangan (UTP) di Provinsi Sumatera Selatan yaitu: karet, padi sawah inbrida, kopi, kelapa sawit, ayam kampung biasa, sapi potong, kambing potong, kelapa, durian lainnya dan padi sawah hibrida.

Sektor Perikanan, mempunyai potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar yang mencakup potensi perikanan di laut dan di perairan umum daratan. Luasnya lahan di Sumatera Selatan merupakan potensi tersendiri bagi perikanan budidaya. Media usaha budidaya yang umum diaplikasikan di Sumatera Selatan adalah tambak, kolam air deras (KAD), kolam air tenang (KAT), budidaya mina padi di sawah, keramba dan keramba jaring apung (KJA). Produksi kelautan dan perikanan Sumsel berasal dari dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap Provinsi Sumsel tahun 2022 adalah 151.241 ton, atau naik sebesar 4,93 % dibandingkan tahun 2021 yang

sebesar 144.136 ton. Pencapaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 masih kurang dari target tahun 2022 sebesar 225.000 ton.

Sektor Perdagangan, nilai ekspor Sumatera Selatan Januari 2024 mencapai US\$441,35 juta atau turun 28,17 persen dibanding ekspor Desember 2023. Sebaliknya jika dibanding Januari 2023 nilai ekspor turun sebesar 23,78 persen. Ekspor nonmigas Januari 2024 mencapai US\$401,79 juta, turun 30,02 persen dibanding Desember 2023. Dibanding Januari 2023 ekspor nonmigas turun sebesar 26,98 persen. Nilai impor Sumatera Selatan Januari 2024 mencapai US\$221,43 juta, naik 23,62 persen dibandingkan Desember 2023, dan meningkat hingga lima kali lipat jika dibandingkan Januari 2023 dengan nilai US\$49,97 juta. Impor migas Januari 2024 senilai US\$1,75 juta, turun 6,76 persen dibandingkan Desember 2023, dan juga menurun sebesar 56,18 persen dibandingkan Januari 2023. Impor non migas Januari 2024 senilai US\$219,68 juta, naik 23,94 persen dibandingkan Desember 2023, dan naik hingga 377,79 persen dibandingkan Januari 2023. Perkembangan realisasi nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) disajikan pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3

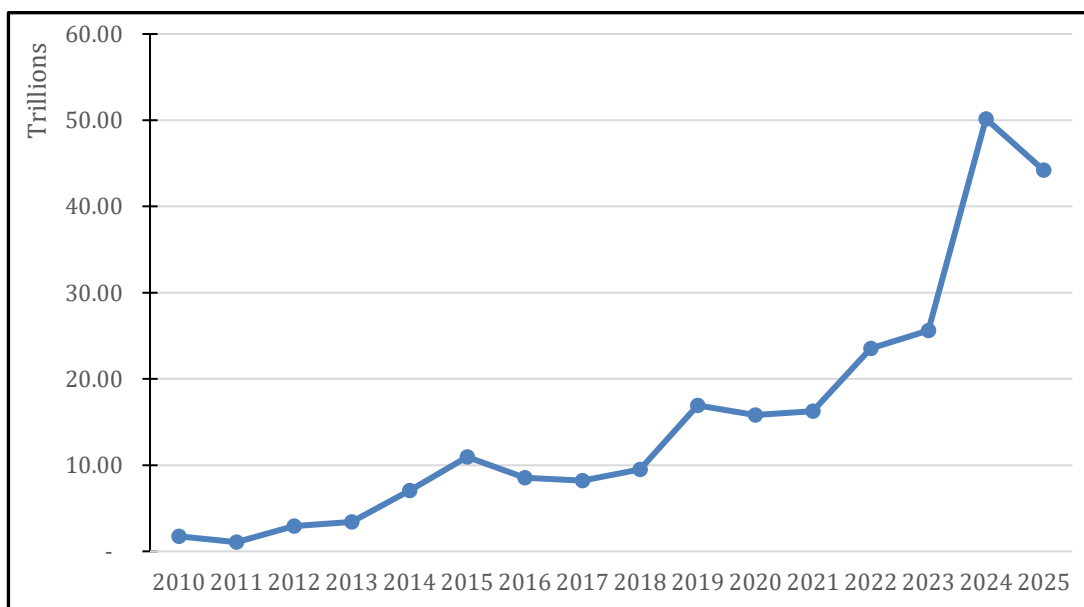
Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

TAHUN	REALISASI PMDN [Rp.]	TINGKAT PERTUMBUHAN (%)
2010	1.738.400.000.000,00	
2011	1.068.900.000.000,00	(38,51)
2012	2.930.600.000.000,00	174,17
2013	3.396.000.000.000,00	15,88
2014	7.042.800.000.000,00	107,39
2015	10.944.100.000.000,00	55,39
2016	8.534.100.000.000,00	(22,02)
2017	8.200.200.000.000,00	(3,91)
2018	9.519.800.000.000,00	16,09
2019	16.921.100.000.000,00	77,75

2020	15.824.500.000.000,00	(6,48)
2021	16.266.900.000.000,00	2,80
2022	23.526.000.000.000,00	44,62
2023	25.602.400.000.000,00	8,83
2024	50.165.758.264.940,60	95,94
2025	44.214.946.618.377,00	(11,86)

Sumber: BPS Sumsel dan BKPM (2026)

Perkembangan nilai realisasi investasi berdasarkan jenis Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama kurun waktu 16 tahun terakhir (2010 – 2025) dengan pergerakan sangat fluktuatif, tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 174,17 % dan terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar (38,51 %). Namun trend perkembangan nilai investasi di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan angka peningkatan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3 berikut.



Sumber: BPS Sumsel dan BKPM (2026)

Gambar 2.3

Perkembangan Nilai Realisasi PMDN

Provinsi Sumatera Selatan juga mencatat perkembangan nilai realisasi berdasarkan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditunjukkan pada Tabel 2.4 berikut.

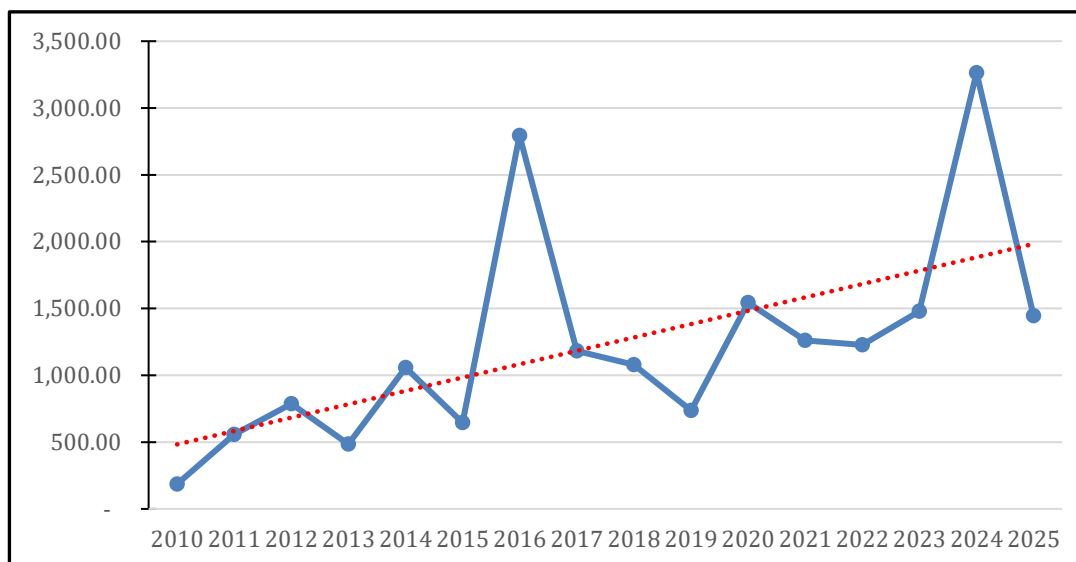
Tabel 2.4

Nilai Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)

TAHUN	REALISASI PMA [Juta US\$]	TINGKAT PERTUMBUHAN (%)
2010	186,30	
2011	557,30	199,14
2012	786,40	41,11
2013	485,90	(38,21)
2014	1.056,50	117,43
2015	645,80	(38,87)
2016	2.793,50	332,56
2017	1.182,90	(57,66)
2018	1.078,60	(8,82)
2019	736,50	(31,72)
2020	1.543,90	109,63
2021	1.259,70	(18,41)
2022	1.226,30	(2,65)
2023	1.478,60	20,57
2024	3.264,35	120,77
2025	1.445,31	(55,72)

Sumber: BPS Sumsel dan BKPM (2026)

Perkembangan nilai realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Sumatera Selatan mengalami trend perkembangan yang sangat fluktuatif, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 199,14 % sementara tingkat pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar (57,66 %). Perkembangan nilai realisasi PMA disajikan pada Gambar 2.4 berikut.



Sumber: BPS Sumsel dan BKPM (2026)

Gambar 2.4

Perkembangan Nilai Realisasi PMA

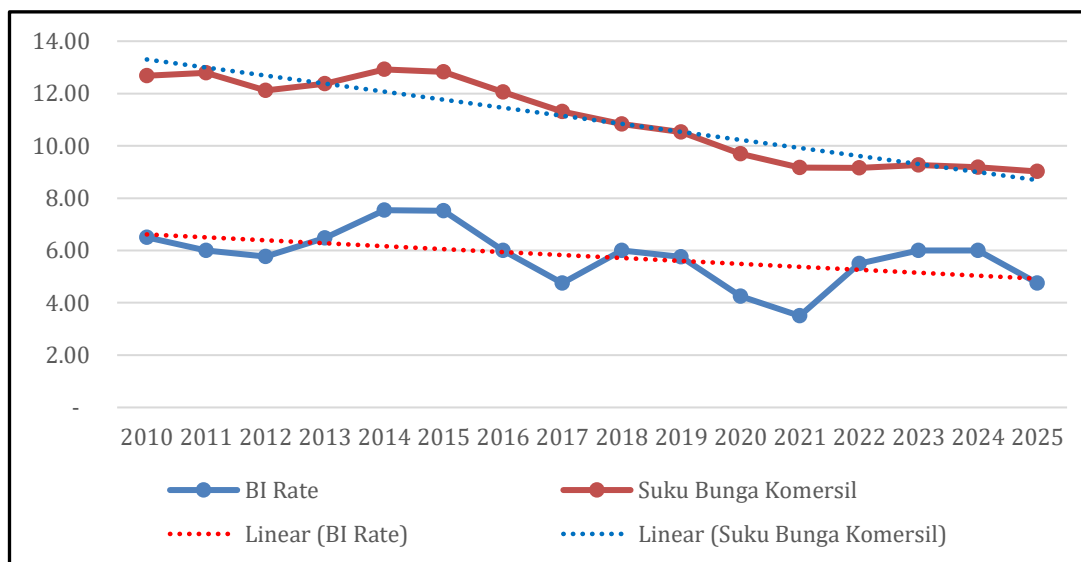
IV. PERKEMBANGAN SUKU BUNGA

Pada saat Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga bank (BI rate) akan meningkatkan pinjaman bank atau kredit meningkat. Sebagai dampak kredit meningkat akan mendorong pelaku usaha untuk memperluas usahanya atau investasi meningkat sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan pengangguran berkurang serta meningkatkan permintaan akan barang dan jasa di pasar produk. Permintaan barang dan jasa meningkat akan berdampak pada pendapatan di setiap faktor produksi sehingga secara agregat meningkatkan pendapatan nasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi dan suku bunga yang tinggi menyebabkan efek negatif pada agregat kinerja perekonomian secara keseluruhan (Tvaronaviciene et al., 2023).

Peningkatan PDRB diikuti dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan daerah yang di dukung oleh peningkatan PAD, peningkatan dana transfer ke daerah serta aktivitas investasi daerah akan

meningkatkan permintaan akan nilai kebutuhan barang dan jasa. Peningkatan kebutuhan barang ini akan memicu tingkat inflasi daerah, untuk itu pemerintahan daerah perlu berkolaborasi dengan otoritas bank sentral dari sisi kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Salah satu kebijakan moneter yang diambil untuk mengendalikan tingkat suku bunga pinjaman bank. Reformasi dalam kebijakan moneter dan dinamika pasar uang untuk meningkatkan daya saing dan pengendalian suku bunga dan cabang bank komersial untuk tingkat pembentukan modal, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (Bista & Basnet, 2022). Laju pertumbuhan PDB dipengaruhi signifikan oleh variabel antara lain: tingkat suku bunga dari sisi kebijakan moneter dan defisit atau surplus belanja pemerintah dari sisi bidang kebijakan fiskal (Stawska & Miszczyńska, 2022).

Kinerja investasi langsung ke daerah yang terus menunjukkan pertumbuhan positif mengindikasikan bahwa ada hubungan dengan pengendalian suku bunga yang dilakukan oleh otoritas Bank Indonesia dari sisi kebijakan moneter. Konsumsi produk barang dan jasa yang semakin meningkat akan memicu pergerakan inflasi yang tak terkendali, sementara kebutuhan terus meningkat seiring dengan permintaan. Dengan mengendalikan tingkat suku bunga, akan menurunkan goncangan sebagai akibat inflasi (Wawrosz & Traksel, 2023). Ketika tingkat inflasi tinggi, masuk yang merupakan harga umum barang dan layanan meningkat, bank sentral harus melakukannya membuat kebijakan untuk mengurangi inflasi. Perkembangan tingkat suku bunga yang merupakan kebijakan moneter dari Bank Indonesia menjadi acuan bagi bank komersil untuk menentukan suku bunga untuk kredit investasi, konsumsi maupun kemudahan berusaha. Perkembangan tingkat suku bunga di tunjukan pada Gambar 2.5 berikut.



Sumber: Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (2026)

Gambar 2.5

Perkembangan Suku Bunga

V. PENERIMAAN DAERAH DARI SEKTOR PBB-KB

Kebijakan regulasi peraturan yang ada, termasuk kedalam kelompok pajak daerah yaitu salah satunya penerimaan dari hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pemerintah daerah terus berupaya untuk mengefektifkan sistem perpajakan agar perusahaan mudah memahaminya dan mematuhi aturan hukum yang berlaku (Javeed Iqbal et al., 2024). Karakteristik dalam reformasi desentralisasi fiskal daerah serta transformasi struktural secara radikal dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin yang berdampak positif terhadap perekonomian kewilayahan (Korotun et al., 2020).

Penerimaan pajak daerah memberikan porsi terbesar dalam komponen PAD, sekitar 70-80 persen dari penerimaan PAD, hal ini disebabkan banyaknya basis data pajak di daerah dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Desentralisasi fiskal yang diharapkan memberikan kemampuan dalam penguatan sektor pajak daerah dengan basis pajak yang

kuat. Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah pada perusahaan swasta di daerah dapat menurunkan ketimpangan pendapatan regional secara permanen pada tidak ada biaya pertumbuhan secara agregat, seperti halnya penerapan keseragaman dalam peraturan transfer pusat (Wang et al., 2024). Tujuan diberikan kebebasan dalam mengelola penerimaan PAD, agar daerah bisa lebih berdikari untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan sektor yang diandalkan pada penerimaan daerah karena adanya program penguatan basis pajak daerah berdasarkan domisili wajib pajak daerah. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dapat menjadi alasan basis data pajak yang kuat. Dengan menerapkan opsen pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta diversifikasi pajak daerah dapat memberikan kekuatan basis pajak. Bahwa perekonomian yang semakin membaik dan keterbukaan perdagangan memberikan perubahan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah. Pentingnya fokus pada upaya liberalisasi keterbukaan perdagangan dan perekonomian yang membaik dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, sekaligus mengendalikan inflasi (Kiruthik Srinivaas et al., 2022.)

Pendapatan sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan angka peningkatan realisasi selama kurun waktu 16 tahun (2010 – 2025) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.5 berikut.

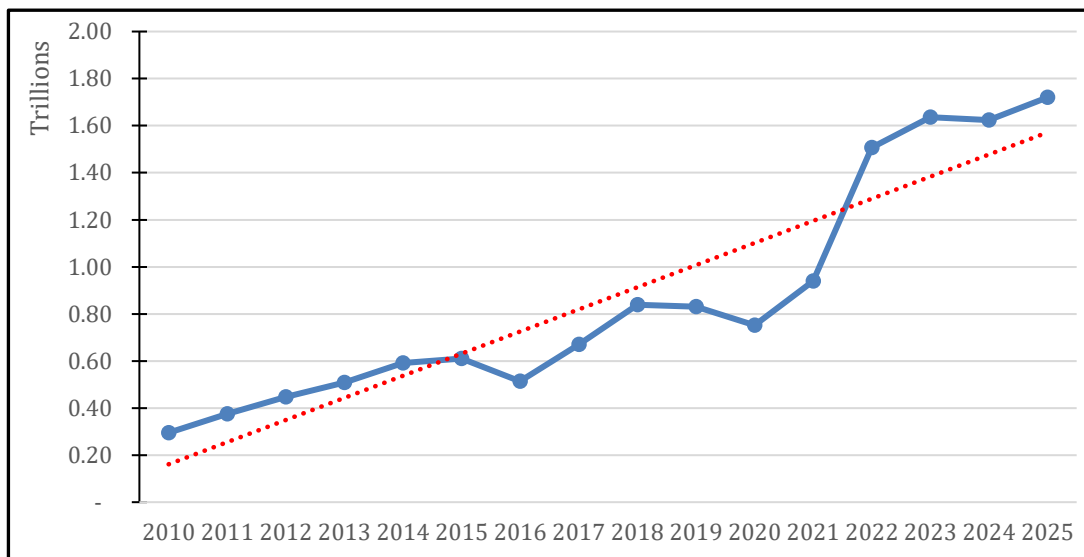
Tabel 2.5

Realisasi Penerimaan PBB-KB

TAHUN	REALISASI PENERIMAAN PBB-KB [Rp.]	TINGKAT PERTUMBUHAN (%)
2010	295.156.403.880,00	
2011	375.173.930.914,00	27,11
2012	447.508.443.100,00	19,28
2013	508.333.162.553,00	13,59
2014	591.598.965.832,00	16,38
2015	610.577.042.978,40	3,21
2016	513.205.513.586,00	(15,95)
2017	670.559.294.854,00	30,66
2018	838.900.055.118,00	25,10
2019	831.263.590.286,00	(0,91)
2020	751.357.346.082,81	(9,61)
2021	939.777.027.499,04	25,08
2022	1.507.131.069.658,25	60,37
2023	1.635.899.652.439,41	8,54
2024	1.623.265.639.257,82	(0,77)
2025	1.719.840.624.162,49	5,95

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Berdasarkan Tabel 2.5 diatas, penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) selama kurun waktu 16 tahun (2010 – 2025), tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 60,37 %, namun pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar (15,95 %). Perkembangan penerimaan PBB-KB menunjukkan angka peningkatan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.6 berikut.



Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Gambar 2.6
Perkembangan Realisasi Penerimaan PBB-KB



BAB III METODOLOGI

I. RUANG LINGKUP

Metode penulisan dan analisis data ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif sesuai dengan sumber informasi secara statistik. Penulisan dengan pendekatan kuantitatif dapat menjawab tantangan yang memerlukan ukuran dan standarisasi terhadap variabel yang dikaji yang sasarannya mengarah pada konsep pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai pokok bahasan periodisasi waktu dan kebijakan makro yang dikeluarkan oleh otoritas tertentu.

Metode analisis data ini dengan standar analisis kuantitatif dapat diartikulasikan bentuk metode analisis dengan landasan pada filosofis positif, digunakan untuk mengkaji pada data sampel, pengambilan data sampel umumnya dilakukan secara acak, pengumpulan data dengan beberapa instrumen kajian, analisis pendistribusian data secara statistik dengan fokus pada alat hipotesis yang telah dirancang (Sugiyono, 2016).

Analisis data ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh PDRB, investasi daerah serta tingkat suku bunga terhadap penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Fokus analisis data melibatkan seperti pengaruh penerimaan PBB-KB, investasi daerah sebagai *proxy* dari kebijakan desentralisasi fiskal serta suku bunga sebagai *proxy* dari kebijakan moneter.

II. JENIS DAN SUMBER DATA

Dalam analisis ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif sedangkan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh organisasi atau lembaga lain dan tersedia untuk umum. Data yang digunakan mencakup data time series. Dalam analisis ini menggunakan data tahunan periode 2010 hingga 2025. Sumber utama data yang digunakan dalam analisis ini meliputi Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta sumber-sumber lain seperti jurnal, artikel, dan laporan.

III. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data dalam analisis ini berupa sekunder, yang melibatkan pengumpulan informasi dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti literatur, laporan resmi, data statistik, dan dokumentasi terkait lainnya. Pengumpulan data statistik terkait PDRB, investasi daerah, suku bunga dan penerimaan PBB-KB pada Provinsi Sumatera Selatan. Data ini berasal dari lembaga pemerintah, atau lembaga riset yang memiliki informasi terkait pembangunan ekonomi desentralisasi fiskal dan kebijakan moneter. Hasil analisis dari konferensi resmi, kebijakan, dan laporan dari sumber data sekunder. Ini mencakup rencana strategis, kebijakan pembangunan, dan dokumen lain yang dapat memberikan wawasan mengenai upaya dalam mencapai peningkatan penerimaan PBB-KB.

IV. POPULASI DAN SAMPEL

Dalam analisis ini mengamati perbedaan tingkat perkembangan PDRB di Provinsi Sumatera Selatan dari sektor Pertambangan dan Penggalian antara 18,32 % - 24,60 %, kemudian sektor Industri Pengolahan antara 17,51 % - 19,73 %, kemudian sektor Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 13,08 % - 15,71 %, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 12,97 % - 13,85 % serta Kegiatan Kontruksi memberikan kontribusi sebesar 10,67 % - 12,53 %.

Dalam analisis ini, selain keterbatasan data, pemilihan variabel yang mempengaruhi penerimaan PBB-KB didasarkan pada beberapa alasan penting, antara lain tersebut mewakili salah satu penerimaan pajak daerah. Pemilihan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terkait perbedaan kebijakan dalam menggali potensi penerimaan PBB-KB dalam menyikapi meningkatkan optimalisasi PAD, kebijakan investasi daerah, pengendalian suku bunga pada Provinsi Sumatera Selatan.

V. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penulisan analisis ini, menggunakan daftar istilah yang perlu dilakukan persamaan persepsi mengenai definisi operasional dari masing – masing variabel yang akan dilakukan analisis. Definisi operasional tersaji pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

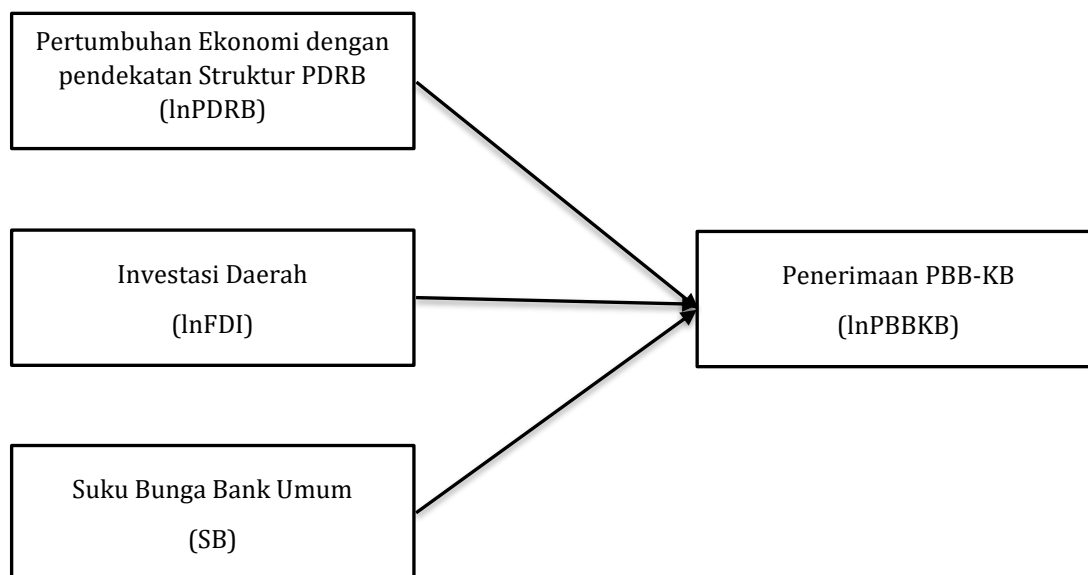
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Simbol	Metadata	Sumber
PBB-KB	lnPBBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat	Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
PDRB	lnPDRB	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional provinsi menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu	Badan Statistik Pusat
Investasi Daerah	lnFDI	Total Investasi Daerah (Rupiah)	Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta

Suku Bunga Bank Umum	SB	Tingkat suku bunga rata-rata menurut jenis penggunaan modal kerja, investasi dan konsumsi (persen)	Badan Pusat Statistik Indonesia Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia
----------------------	----	--	--

Sumber: Data diolah dari beberapa sumber (2026)

Adapun kerangka konseptual dari analisis ini:



Gambar 3.1

Kerangka Konseptual Analisis

VI. TEKNIK ANALISIS

Dalam penyusunan ini, analisis pengaruh PDRB, Investasi Daerah, Suku Bunga terhadap penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) pada Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan menggunakan regresi. Teknik ini digunakan sangat dimungkinkan karena penggunaan data berdasarkan waktu (*time series*), untuk memberikan wawasan yang lebih lengkap tentang hubungan antar variabel dengan mempertimbangkan variasi perubahan dalam variabel dari waktu ke waktu. Dengan data regresi ini, analisis dapat lebih mendalam, mengatasi

heterogenitas provinsi, serta menghasilkan estimasi yang lebih akurat terhadap hubungan dinamis antar variabel. Model regresi data panel yang digunakan mencakup *Fixed Effects Model* (FEM), *Random Effects Model* (REM), dan *Common Effects Model* (CEM). Berikut adalah penjelasan masing-masing model:

1. ***Common Effect Model (CEM)***

Common Effects Model (CEM) adalah model regresi data panel yang paling sederhana, yang tidak mengakomodasi efek spesifik dari setiap entitas. CEM mengasumsikan bahwa koefisien regresi adalah sama di seluruh entitas dan waktu, tanpa mempertimbangkan perbedaan spesifik antar entitas.

2. ***Fixed Effect Model (FEM)***

Fixed Effects Model (FEM) digunakan untuk mengatasi heterogenitas yang tidak teramati antar entitas dengan asumsi bahwa efek spesifik setiap entitas provinsi adalah tetap dan berkorelasi dengan variabel independen. Model ini berguna ketika ada faktor-faktor tetap yang mempengaruhi variabel dependen yang tidak dapat diukur secara langsung.

3. ***Random Effect Model (REM)***

Random Effects Model (REM) digunakan ketika efek spesifik entitas dianggap tidak berkorelasi dengan variabel independen. REM memungkinkan variasi antar entitas provinsi untuk dimodelkan sebagai variabel acak yang berbeda dari variabel independen.

Dari model tersebut, maka persamaan yang terbentuk:

$$PBBKB_t = \alpha_i + \beta_1 PDRB_t + \beta_2 FDI_t + \beta_3 SB_t + e_t \dots \dots \dots (3.1)$$

Dimana:

PBBKB	: Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
FDI	: Investasi Daerah
SB	: Suku Bunga
α_i	: konstanta spesifik untuk setiap entitas i (efek tetap)
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	: koefisien variabel independen
e	: koefisien error
t	: Data deret waktu

A. Uji Stationeritas

Stasioneritas mengindikasikan bahwa data tidak mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuasi data berpusat di sekitar suatu nilai rata-rata. Konsep stasioneritas dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Stasioner dalam rata-rata (*mean*), yang menunjukkan fluktuasi data di sekitar nilai rata-rata yang tetap. Dari plot data, seringkali dapat dilihat apakah data tersebut stasioner atau tidak. Apabila dianalisis menggunakan *Plot Autocorrelation Function* (ACF), maka autokorelasi dari data stasioner akan menurun mendekati nol setelah beberapa selisih waktu;
2. Stasioneritas dalam variansi, yaitu ketika struktur data tetap memiliki fluktuasi yang konstan dari waktu ke waktu tanpa perubahan yang signifikan. Secara visual, hal ini dapat diketahui melalui *plot time series* yang menampilkan fluktuasi data dari waktu ke waktu.

B. Pemilihan Model Terbaik

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan struktural yang signifikan antara kelompok data, yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menggunakan model regresi terpisah atau model tunggal. Uji ini membandingkan dua model: satu model yang menganggap bahwa seluruh sampel dapat dianalisis dengan satu model regresi, dan model lainnya yang menganggap bahwa ada perbedaan signifikan antara kelompok data yang memerlukan model regresi terpisah. Hasil dari uji Chow memberikan informasi tentang apakah perbedaan dalam struktur data memerlukan perubahan dalam spesifikasi model, seperti penerapan model regresi yang berbeda untuk subkelompok data.

3. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara *Fixed Effects Model* (FEM) dan *Random Effects Model* (REM). Uji ini menguji apakah ada korelasi antara efek spesifik entitas (seperti provinsi) dengan variabel independen dalam model regresi. Jika uji Hausman menunjukkan bahwa terdapat korelasi signifikan, maka model FEM lebih disarankan karena dapat menangani heterogenitas antar entitas dengan lebih baik. Sebaliknya, jika uji Hausman menunjukkan tidak adanya korelasi signifikan, maka model REM lebih cocok. Uji ini penting untuk memastikan bahwa model yang dipilih dapat menangani heterogenitas dalam data panel dengan tepat, sehingga hasil analisis menjadi lebih valid dan reliabel.

4. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan apakah model regresi data panel harus menerapkan *Fixed Effects Model* atau *Random Effects Model*. Uji ini menguji hipotesis nol bahwa *Random Effects Model* lebih sesuai dibandingkan *Fixed Effects Model*. Dalam konteks ini, uji LM membantu memutuskan apakah ada variasi signifikan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan menggunakan *Random Effects Model*, sehingga *Fixed Effects Model* mungkin lebih tepat.

Uji LM dilakukan dengan membandingkan hasil dari *Random Effects Model* dengan model regresi yang mempertimbangkan efek spesifik entitas. Jika uji LM menunjukkan adanya efek spesifik yang signifikan, maka *Fixed Effects Model* lebih disarankan karena dapat menangani variasi antar entitas yang tidak dapat diakomodasi oleh *Random Effects Model*. Sebaliknya, jika hasil uji LM menunjukkan bahwa *Random Effects Model* sudah memadai, maka model ini lebih sederhana dan mungkin lebih efisien.

C. Uji Palanggaran Asumsi

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi adanya korelasi tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Korelasi tinggi antara variabel independen, yang diukur menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF), dapat mempengaruhi kestabilan estimasi koefisien dan interpretasi hasil. Jika ditemukan nilai VIF yang tinggi, hal ini menunjukkan adanya multikolinearitas yang mungkin memerlukan penyesuaian pada model, seperti menghapus variabel atau menggabungkan variabel yang berkorelasi tinggi.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas diperlukan untuk memastikan bahwa varians kesalahan regresi konsisten di seluruh pengamatan. Uji Breusch-Pagan atau White digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Jika heteroskedastisitas terdeteksi, estimasi *robust* atau transformasi variabel dapat diterapkan untuk menangani masalah ini dan memastikan bahwa asumsi dasar regresi terpenuhi.

3. Uji Autokorelasi

Ghozali (2017:121) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Salah satu uji formal yang paling populer untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin-Watson (DW), dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah:

- a. Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (d_U) dan ($4-d_U$) maka koefisien autokorelasinya sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi;
- b. Bila DW lebih rendah dari batas bawah atau lower bound (d_L) maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif;
- c. Bila DW lebih besar dari ($4-d_U$) maka koefisien autokorelasinya lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi;

- d. Bila nilai DW terletak antara batas atas (d_U) dan bawah (d_L) atau DW terletak antara $(4d_U)$ dan $(4-d_L)$ maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.



BAB IV ANALISIS DATA

Pada BAB IV dilakukan analisis data dengan menggunakan angka kuantitatif dengan metode statistik berdasarkan metodologi yang telah dijelaskan pada BAB IV dengan hasil sebagai berikut:

I. STATISTIK DESKRIPSI

Statistik deskripsi pada Tabel 4.1 dibawah menunjukkan bahwa untuk variabel $\ln\text{PBBKB}$ memiliki rerata sebesar 27,3475 yang mengindikasikan bahwa kinerja PBBKB yang relatif baik di Provinsi Sumatera Selatan, sementara $\ln\text{PDRB}$ dengan rerata sebesar 33,6062 mengindikasikan bahwa variabilitas yang signifikan dengan standar deviasi sebesar 0,3944, hal ini menunjukkan perbedaan PDRB yang cukup besar. Variabel $\ln\text{FDI}$ dengan rerata sebesar 29,8962 dengan nilai *skewness* negatif -0,4354.

Tabel 4.1
Hasil Pengujian Statistik Deskripsi

Deskripsi	$\ln\text{PBBKB}$	$\ln\text{PDRB}$	$\ln\text{FDI}$	SB
Mean	27.34750	33.60625	29.89625	10.99563
Median	27.29000	33.62500	29.95000	11.07000
Maximum	28.17000	34.21000	31.55000	12.92000
Minimum	26.41000	32.90000	27.70000	9.020000
Std. Dev	0.546315	0.394426	1.097390	1.556462
Skewness	0.159271	-0.126655	-0.435425	-0.078996
Kurtosis	2.024657	2.017174	2.440646	1.336422
Jarque-Bera	0.701842	0.686742	0.714170	1.861636

Probability	0.704039	0.709375	0.699713	0.394231
Sum	437.5600	537.7000	478.3400	175.9300
Sum Sq. Dev	4.476900	2.333575	18.06398	36.33859
Observation	16	16	16	16

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews, (2026)

II. MULTIKOLENIARITAS

Tabel 4.2
Multikoleniaritas

	lnPBBKB	lnPDRB	lnFDI	SB
Multicollinearity				
lnPBBKB	1.000000	0.979376	0.929537	-0.890135
lnPDRB	0.979376	1.000000	0.963141	-0.913987
lnFDI	0.929537	0.963141	1.000000	-0.833403
SB	-0.890135	-0.913987	-0.833403	1.000000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews, (2026)

Tabel 4.2 menunjukkan hasil pengujian multikoleniaritas yang digunakan untuk mengestimasi hubungan matriks antar variabel lnPBBKB, lnPDRB, lnFDI serta SB. Nilai korelasi hasil pengujian diperoleh tidak menunjukkan adanya gejala multikoleniaritas yang serius karena masih dibawah nilai 1,0. Korelasi positif antara lnPBBKB dan lnPDRB sebesar 0,9793, antara lnPBBKB dan lnFDI sebesar 0,9295, antara lnPBBKB dan SB sebesar -0,8901 hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan PBBKB berhubungan dengan peningkatan PDRB, investasi daerah. Sebaliknya, hubungan negatif sangat kuat ditunjukkan antara lnPBBKB dan SB sebesar (-0,8901) dan antara lnPDRB dan SB sebesar (-0,9139) serta antara lnFDI dan SB sebesar (-0,8334) mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan PBBKB, peningkatan pertumbuhan PDRB serta peningkatan nilai investasi daerah berkorelasi dengan kecenderungan penurunan tingkat suku bunga bank.

III. UJI AKAR UNIT

Uji akar unit panel data (PP-Fisher Chi-square) untuk meneliti sifat stasioneritas dari data deret waktu semua variabel yang diteliti. Pengujian stasioner data dengan unit root test menggunakan kriteria uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF-Test) dan Phillips-Perron (PP-Test) memberikan gambaran bahwa sebagian kecil variabel tidak stasioner pada pengujian ditingkat level dan menjadi stasioner pada pengujian ditingkat perbedaan pertama (diferensiasi). Untuk variabel lnPBBKB menunjukkan nilai ADF-test 0,1145 namun tidak signifikan pada tahap pengujian level dan menjadi signifikan dengan hasil pengujian -4,8493 pada tingkat signifikansi 1 persen pada pengujian di *differensiasi* pertama. Variabel lnPDRB menunjukkan hasil test ADF sebesar -0.7692 namun tidak signifikan pada tahap pengujian di level dan menjadi signifikan dengan hasil pengujian -4.1376 pada tingkat signifikansi 1 persen pada pengujian di *differensiasi* pertama. Variabel lnFDI menunjukkan ADF-test senilai -0.9262 namun tidak signifikan pada tahap pengujian di level dan menjadi signifikan dengan hasil pengujian -5.9088 pada tingkat signifikansi 1 persen pada pengujian di *differensiasi* pertama. Variabel SB menunjukkan ADF-test senilai -1,7786 namun tidak signifikan pada tahap pengujian di level dan menjadi signifikan dengan hasil pengujian -5.0601 pada tingkat signifikansi 1 persen pada pengujian *differensiasi* pertama.

Pada pengujian dengan Phillips-Perron (PP-Test), untuk variabel lnPBBKB menunjukkan nilai PP-test -0.9849 tidak signifikan pada tahap pengujian level dan menjadi signifikan dengan hasil pengujian -4.8184 pada tingkat signifikansi 1 persen pada pengujian di *differensiasi* pertama. Variabel lnPDRB menunjukkan nilai PP-test -2,7490 telah signifikan pada tahap pengujian di level dengan tingkat signifikansi 10 %. Variabel lnFDI menunjukkan PP-test sebesar -0,7786 namun tidak signifikan pada tahap pengujian di level dan menjadi signifikan dengan hasil pengujian -5.9088 pada tingkat signifikansi 1 persen pada pengujian di *differensiasi* pertama. Variabel SB menunjukkan PP-test sebesar -0,2656 namun tidak signifikan

pada tahap pengujian di level dan menjadi signifikan dengan hasil pengujian -5,3281 pada tingkat signifikansi 1 persen pada pengujian *differensiasi* pertama. Hasil selengkapnya uji akar unit tersaji pada Tabel 5.3 berikut.

Tabel 4.3

Hasil Pengujian Akar Unit

Variabel	ADF-Test		PP-Test	
	level	1 st diferensiasi	level	1 st diferensiasi
$\Delta \ln PBBKB$	0.1145	-4.8493***	-0.9849	-4.8184***
$\Delta \ln PDRB$	-0.7692	-4.1376***	-2.7490*	-4.9313***
$\Delta \ln FDI$	-0.9262	-5.9088***	-0.7786	-5.9088***
ΔSB	-1.7786	-5.0601***	-0.2656	-5.3281***

Catatan: *, ** dan *** menunjukkan tingkat signifikan pada level 10%, 5% dan 1%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews, (2026)

IV. UJI PELANGGARAN ASUMSI

1. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Tabel 5.4 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki varians residual yang konstan. Berdasarkan nilai p-value, terlihat bahwa sebagian besar variabel tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 5 persen, yang menunjukkan tidak adanya permasalahan heteroskedastisitas yang serius. Hal ini menggambarkan bahwa model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas, dimana varians dari error bersifat konstan dan tidak ada indikasi bahwa error bergantung pada variabel independent.

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Variabel Dependen: lnPBBKB				
Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	0.228449	1.660290	0.137596	0.8928
LnPDRB	0.014830	0.059592	0.248855	0.8077
LnFDI	0.008643	0.015725	0.549656	0.5926
SB	-0.001984	0.007350	-0.269891	0.7918

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews, (2026)

2. Uji Ketergantungan Silang

Uji *Cross-Section Dependence* (CD) adalah uji statistik yang digunakan dalam data panel untuk menguji apakah terdapat ketergantungan silang antara unit *cross-section*. Ketergantungan silang berarti bahwa ada korelasi antara unit *cross-section*, sehingga kejadian di satu unit mungkin mempengaruhi unit lainnya.

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Cross Section Dependence (CD)

Test	Statistik	d.f	Prob
Breush-Pagan LM	10,350	45	1,000
Pesaran scaled LM	-3,652		0,000
Bias-corrected scaled LM	-4,009		0,000
Pesaran CD	0,786		0,431

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews, (2026)

Hasil uji *Cross-Section Dependence* menunjukkan adanya ketergantungan silang yang signifikan antar unit *cross-section* dalam pemilihan model. Hipotesis nol yang menyatakan tidak ada ketergantungan silang ditolak dengan kuat berdasarkan nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi 1 persen pada seluruh uji variabel. Pada uji Breush-Pagan LM, nilai statistik uji sebesar 10,350 dengan nilai probabilitas 1,000 menunjukkan bahwa tidak adanya

ketergantungan silang yang tidak signifikan. Pada uji pesaran scaled LM dengan angka statistik sebesar (-3,652) dan probabilitas 0,000 yang menunjukkan bahwa adanya ketergantungan silang yang signifikan. Pada uji bias-corrected scaled LM dengan angka statistik uji sebesar (-4,009) dengan nilai probabilitas 0,000 yang mengindikasikan bahwa adanya ketergantungan silang yang signifikan. Terakhir, pada uji pesaran CD dengan nilai statistik 0,786 dan memiliki probabilitas 0,431 yang mengindikasikan bahwa tidak adanya korelasi antar unit cross-section.

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

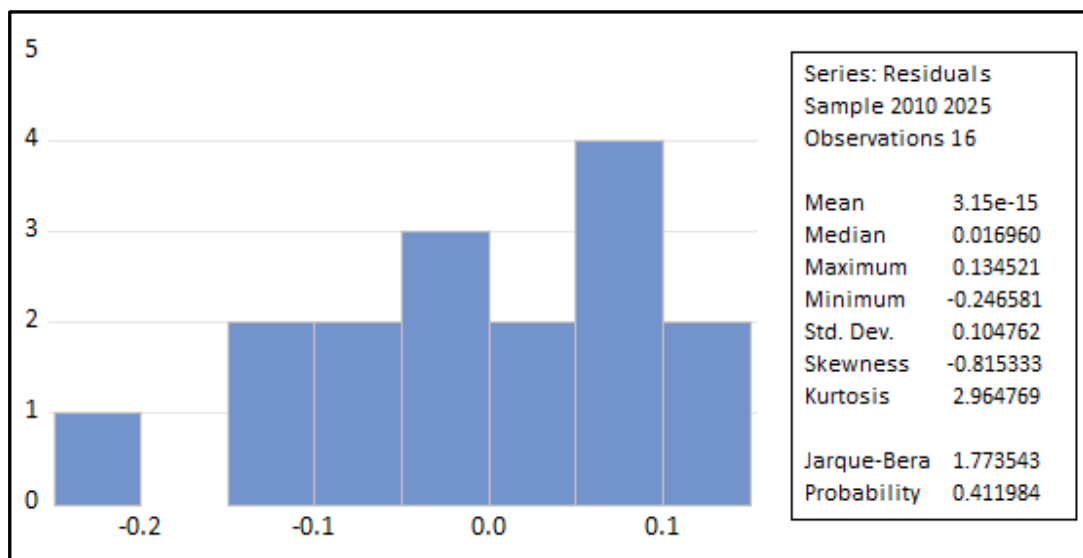
Uji Lagrange Multiplier (LM) dipergunakan untuk menaksir apakah model regresi data panel harus menerapkan regresi *Fixed Effects Model* atau regresi *Random Effects Model*. Uji ini menguji hipotesis nol bahwa *Random Effects Model* lebih sesuai dibandingkan *Fixed Effects Model*. Dalam konteks ini, uji LM membantu memutuskan apakah ada variasi signifikan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan menggunakan *Fixed Effects Model*, sehingga *Fixed Effects Model* mungkin lebih tepat.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi, seperti Durbin-Watson atau Breusch-Godfrey dengan nilai 1,626, digunakan untuk mengidentifikasi apakah kesalahan regresi berkorelasi secara signifikan antara periode waktu. Autokorelasi dapat mempengaruhi hasil model regresi dan membuat estimasi koefisien tidak akurat. Jika autokorelasi ditemukan, model dapat diperbaiki dengan estimasi robust atau model autoregressive untuk mengatasi masalah tersebut.

5. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan Jarque-Bera Test menunjukkan statistik uji sebesar 1,773543 dengan probabilitas (p-value) 0,411984. Dalam pengujian normalitas, hipotesis nol (H_0) yang diuji adalah bahwa data mengikuti distribusi normal. Jika p-value lebih besar dari tingkat signifikansi yang biasa digunakan (misalnya 0.05), maka hipotesis nol tidak dapat ditolak, yang berarti data tidak memiliki cukup bukti untuk menyatakan bahwa distribusinya tidak normal.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews, (2026)

Gambar 4.1

Hasil Pengujian Normalitas

Dengan p-value sebesar 0,411984, yang lebih besar dari 0.05, kita tidak dapat menolak hipotesis nol. Ini berarti bahwa data residual dalam model mengikuti distribusi normal pada tingkat signifikansi 5 persen.

V. PEMILIHAN KRITERIA MODEL

1. Hasil Uji Chow

Chow test dipergunakan untuk mengestimasi model regresi data panel antara *Common Effects Model* dan *Fixed Effects Model*, penggunaan uji

Chow ini untuk menilai kinerja stabilitas parameter model, hasil hipotesis pengujian ini:

- Probabilitas lebih kecil dari tingkat kepercayaan 5 persen, maka H0 ditolak dan H1 diterima
- Probabilitas lebih besar dari tingkat kepercayaan 5 persen, maka H1 ditolak dan H0 diterima.

Tabel 4.6

Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistik	d.f	p value
Cross-section F	1.664,362	(9,134)	0,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews, (2026)

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa hasil uji Chow, untuk nilai F 0,000, dimana nilai p-value lebih kecil dari tingkat kepercayaan 0,01, maka hipotesis H0 ditolak dan menerima H1, maka dipilih *Fixed Effects Model* dan syarat terpenuhi untuk dilanjutkan pada uji Hausman.

2. Hasil Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji untuk menganalisis pendekatan model regresi terbaik dan sesuai dengan data panel yang diregresi, pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan *Fixed Effects Model* dan *Random Effects Model*. Uji Hausman ini menggunakan nilai Chi², sehingga kesimpulan pemilihan metode data panel dalam penelitian ini dapat ditentukan secara statistik dengan hipotesis:

H0 : model regresi yang digunakan *Random Effects Model*

H1 : model regresi yang digunakan *Fixed Effects Model*

Probabilitas lebih kecil dari tingkat kepercayaan 5 persen, maka H0 ditolak dan H1 diterima

Probabilitas lebih besar dari tingkat kepercayaan 5 persen, maka H1 ditolak dan H0 diterima.

Tabel 4.7
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi ² Statistik	Chi ² d.f	p value
Cross-section random	65,516	6	0,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews, (2026)

Tabel 4.7 menjelaskan bahwa berdasarkan hasil uji Hausman menunjukkan nilai p-value 0,000 lebih kecil dari tingkat kepercayaan 0,01, maka H0 ditolak dan H1 diterima sehingga *Fixed Effects Model* lebih baik apabila dibandingkan dengan *Random Effects Model*.

VI. MODEL REGRESI

Dalam analisis ini, teknik analisis yang diterapkan adalah analisis data tunggal menggunakan perangkat lunak Eviews 13. Estimasi data panel dilakukan menggunakan tiga metode, yaitu: *Common Effects Model (CEM)*, *Fixed Effects Model (FEM)*, dan *Random Effects Model (REM)*. Hasil estimasi yang diperoleh dari metode *Common Effects Model*, *Fixed Effects Model*, dan *Random Effects Model*.

Tabel 4.8
Hasil Estimasi dengan Metode CEM, FEM, dan REM

Variabel Dependent: lnPBBKB						
Variabel	<i>Common</i>		<i>Fixed</i>		<i>Random</i>	
	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob
C	-1,290	0,411	0,709	0,000	4,499	0,000
lnPDRB	-0,323	0,000	0,258	0,000	0,163	0,000
lnFDI	0,262	0,000	0,046	0,000	0,033	0,459
SB	0,183	0,000	-0,202	0,000	0,009	0,299

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews, (2026)

Tabel 4.8 menggambarkan bahwa dalam pengujian menggunakan *Common Effect Model* variabel lnPDRB memiliki tanda negatif dan memiliki pengaruh signifikan, variabel lnFDI memiliki tanda positif dan berpengaruh signifikan, variabel SB memiliki tanda positif dan berpengaruh signifikan terhadap lnPBBKB.

Pada pengujian *Fixed Effects Model* hasil yang didapatkan yaitu variabel lnPDRB bertanda positif dan berpengaruh signifikan, variabel lnFDI bertanda positif dan berpengaruh signifikan, variabel SB memiliki tanda negatif dan berpengaruh signifikan terhadap lnPBBKB.

Pengujian model terakhir yang menggunakan *Random Effects Model*, didapat hasil yaitu variabel lnPDRB memiliki tanda positif dan berpengaruh signifikan, variabel lnFDI memiliki tanda positif dan tidak signifikan, variabel SB memiliki tanda positif dan tidak signifikan terhadap lnPBBKB.

VII. HASIL ESTIMASI MODEL AKHIR

Dalam analisis regresi data tunggal, penentuan model yang optimal dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yang berbeda. Pertama, dengan melakukan uji Chow untuk membandingkan kecocokan antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Kedua, menggunakan uji Hausman untuk membandingkan kecocokan antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Ketiga, dengan menggunakan uji Breusch- Pagan Lagrange Multiplier (BP-LM) untuk membandingkan kesesuaian antara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model*. Hanya model regresi yang paling sesuai yang akan digunakan untuk menganalisis data penulisan ini. Hasil pengujian kesesuaian model pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Hasil Regresi Uji Pemilihan Model Terbaik

Jenis Pengujian Model	Prob. Chi-Square	Nilai Signifikansi	Keterangan
Uji Chow	0,0000	0,05	Model terbaik FEM
Uji Hausman	0,0000	0,05	Model terbaik FEM
Uji BP-LM	0,0000	0,05	Model terbaik REM

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews, (2026)

Dari Tabel 4.9, diperoleh informasi bahwa model terbaik untuk estimasi persamaan penulisan ini adalah *Fixed Effect Model*. Hasil uji chow menunjukkan bahwa probabilitas chi-square adalah 0,0000, yang lebih kecil dari 0,05, menyimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih sesuai daripada *Common Effect Model*. Selanjutnya, uji Hausman dilakukan untuk membandingkan *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*, dan hasilnya menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik daripada *Random Effect Model*, dengan probabilitas chi- square sebesar 0,000, yang juga lebih kecil dari 0,05. Kemudian, uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk membandingkan antara *Common Effect Model* dan

Random Effect Model, menunjukkan bahwa *Random Effect Model* lebih baik daripada *Common Effect Model*, dengan probabilitas chi-square sebesar 0,0000, yang juga lebih kecil dari 0,05.

Tabel 4.10
Hasil Estimasi Model Akhir

Variabel Dependen: lnPBBKB			
Variabel	Koefisien	S.E	t-Statistik
C	0,709***	0,295	2,403
lnPDRB	0,258***	0,009	25,880
lnFDI	0,046***	0,012	3,746
SB	-0,202**	0,057	-3,517

Catatan: ***, ** dan * taraf signifikan level 1%, 5% and 10%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews, (2026)

Hasil estimasi model dengan model terbaik *Fixed Effects Model* yaitu:

$$\ln\text{PBBKB} = 0,709 + 0,258\ln\text{PDRB} + 0,046\ln\text{FDI} - 0,202\text{SB}$$

Pada persamaan diatas, nilai konstanta sebesar 0,709 menjelaskan jika lnPDRB, lnFDI, SB bernilai nol atau tanpa kinerja, maka lnPBBKB sebesar 0,709 rupiah. Koefisien variabel lnPDRB sebesar 0,258 menjelaskan jika nilai variabel PDRB naik sebesar 1 rupiah, dengan variabel lain dianggap tetap, maka nilai variabel lnPBBKB akan naik sebesar 0,258 rupiah. Variabel lnPDRB mempunyai nilai p-value kurang dari 0,01 yang menjelaskan bahwa pada tingkat kepercayaan sebesar satu persen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap lnPBBKB.

Variabel lnFDI mempunyai koefisien sebesar 0,046 menjelaskan jika nilai variabel lnFDI naik sebesar 1 rupiah dan variabel lain dianggap tetap, maka nilai variabel lnPBBKB akan naik sebesar 0,046 rupiah. Variabel lnFDI mempunyai nilai p-value kurang dari 0,01 yang menjelaskan bahwa pada tingkat kepercayaan sebesar 1 persen memiliki pengaruh signifikan

terhadap variabel lnPBBKB. Variabel SB mempunyai koefisien negatif sebesar 0,202 menjelaskan jika nilai variabel SB turun sebesar 1 persen dan variabel lain dianggap tetap, maka nilai variabel lnPBBKB akan meningkat sebesar 0,202 rupiah. Variabel SB mempunyai p-value kurang dari 0,01 menjelaskan bahwa pada tingkat kepercayaan sebesar 1 persen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel lnPBBKB.

VIII. PENGUJIAN KOEFISIEN STATISTIK

Hasil estimasi pengujian F statistik merupakan pengujian statistik untuk menganalisis apakah secara bersama-sama koefisien regresi variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil Uji F statistik dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11
Hasil Pengujian F Statistik

<i>F-Statistic</i>	11.136,36
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews, (2026)

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.11, uji F-hitung menunjukkan nilai yang lebih rendah daripada alpha (α) yang ditetapkan sebesar 0,05. Hal ini menyiratkan bahwa secara menyeluruh, variabel-variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen ($\alpha = 5\%$) dengan df numerator 3 dan df denominator 13. F-tabel yang diperoleh adalah 2,17. Hasil dari persamaan penelitian menunjukkan bahwa nilai F-hitung adalah 11.136,36, yang melebihi nilai F-tabel (F-statistik > F- tabel), dengan p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada alpha 1 persen.

Dari hasil estimasi hipotesis dengan menggunakan Uji F statistik seperti yang pada Tabel 5.11, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1

diterima. Oleh karena itu, secara umum dapat diinterpretasikan bahwa variabel independen, yaitu $\ln\text{PDRB}$, $\ln\text{FDI}$ dan SB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap $\ln\text{PBBKB}$ dengan tingkat keyakinan sebesar 95%.

IX. PENGUJIAN t STATISTIK

Pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen diamati melalui uji t statistik. Proses pengujian melibatkan perbandingan antara nilai t-hitung dan t-tabel. Jika nilai t-hitung melebihi nilai t-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang diterapkan adalah:

- H_0 tidak ada hubungan signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen
- H_1 ada hubungan signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen

Tabel 4.10 merupakan hasil pengujian hipotesis menggunakan Uji-t statistik yang menunjukkan nilai antara variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dijelaskan dibawah ini:

- Konstanta (C) memiliki nilai p-value sebesar 0,000, yang signifikan pada tingkat signifikansi 1 persen ($\alpha=0,01$). Ini mengindikasikan bahwa konstanta dalam model memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap variabel terikat.
- Variabel $\ln\text{PDRB}$ memiliki nilai p-value sebesar 0.000, yang signifikan pada tingkat signifikansi 1 persen ($\alpha=0,01$). Ini berarti variabel $\ln\text{PDRB}$ secara statistik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, mengindikasikan bahwa $\ln\text{PDRB}$ memiliki hubungan yang kuat dalam model.
- Variabel $\ln\text{FDI}$ memiliki nilai p-value sebesar 0,000, yang signifikan pada tingkat signifikansi 1 persen ($\alpha=0,01$). Hal ini mengindikasikan bahwa variabel $\ln\text{FDI}$ mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependen dalam model.

- Variabel SB memiliki nilai p-value sebesar 0,001, yang signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha=0,05$). Ini berarti variabel SB secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, mengindikasikan bahwa suku bunga memiliki hubungan yang kuat dalam model.

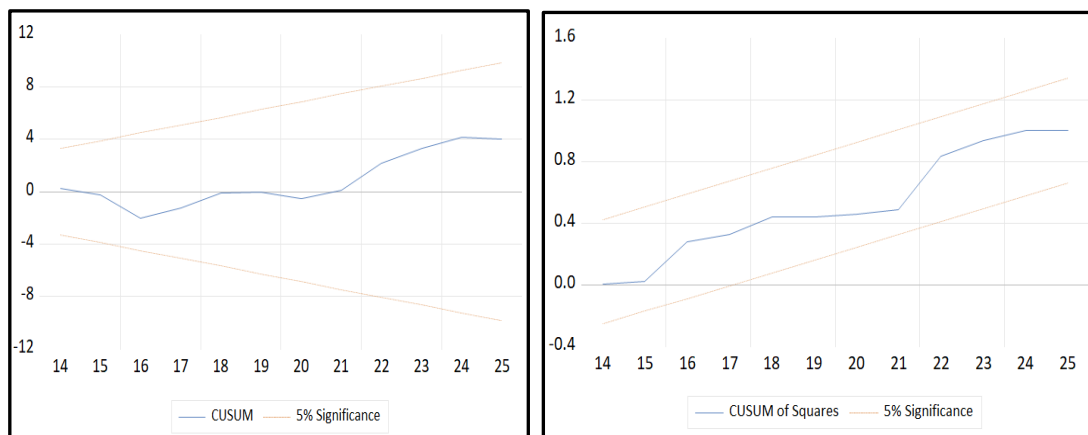
X. KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)

Koefisien determinasi ($1-R^2$) dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model regresi ini, sedangkan koefisien determinasi (*R-Square*) menunjukkan seberapa baik model regresi dapat menggambarkan fluktuasi variabel terikat.

Hasil estimasi regresi data tunggal menggunakan metode *Fixed Effects Model*, didapatkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0.94925 yang berarti bahwa variabel $\ln PDRB$, $\ln FDI$ dan SB mampu menjelaskan variabel $\ln PBBKB$ sebesar 94,925 persen sedangkan sisanya sebesar 0,05075 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penulisan ini.

XI. STABILITAS MODEL

Kemudian, uji CUSUM dilakukan untuk menilai stabilitas hubungan jangka panjang dalam estimasi model regresi. Uji ini secara terus menerus menghitung koefisien regresi dan residual dalam tingkat batas yang ditentukan. Biasanya, identifikasi tingkat batas melibatkan pembuatan grafik yang mewakili berbagai statistik rekursif sebagai fungsi dari variabel transisi berurutan. Ini adalah metode umum yang diterapkan dalam praktik untuk menentukan tingkat batas yang signifikan. Gambar 4.2 menunjukkan *Cumulative SUM of Recursive Residue* (CUSUM) dari hasil uji stabilitas model regresi. Semua garis yang diinginkan berada pada ambang kritis, dan tidak ada yang melewatinya di sepanjang kurva. Gambar 5.2 memberikan bukti stabilitas hasil estimasi model regresi.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews, (2026)

Gambar 4.2

CUSUM Test dan CUSUM of Squares Test

XII. HASIL PEMBAHASAN

1. Hubungan Antara PDRB Terhadap PBBKB

Hasil estimasi dari *Fixed Effect Model* terpilih dalam penulisan ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dalam hubungan yang positif peningkatan PDRB dapat meningkatkan kinerja penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Hal ini disebabkan karena dengan peningkatan PDRB berarti telah meningkatkan konsumsi barang dan jasa, termasuk peningkatan konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor. Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan penerimaan PBBKB mencerminkan kemandirian fiskal daerah dari sisi pendapatan sektor pajak daerah semakin baik. Dengan peningkatan salah satu jenis pajak PBBKB yang semakin meningkat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan lebih mampu untuk mengatur belanja untuk pembiayaan pembangunan daerah untuk peningkatan PDRB. Hasil analisa ini mengkonfirmasi sejalan dengan hasil analisa yang dilakukan oleh (Nizam et al., 2024) yang menyatakan bahwa konsumsi berkorelasi positif dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Hasil analisa dari

analisis empiris sejalan dengan pandangan yang dikemukakan (Sima et al., 2023) yang mengatakan bahwa desentralisasi pengeluaran dan desentralisasi pendapatan mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap PDB suatu negara.

Pemerintah daerah yang telah diberikan keleluasaan sesuai dengan kewenangan dalam desentralisasi fiskal pendapatan, dapat menerapkan beberapa strategi dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan PBBKB. Hasil analisa ini belum sejalan dengan pandangan (Kaneva et al., 2023) yang mengatakan bahwa desentralisasi pendapatan merugikan pertumbuhan PDB suatu negara dan desentralisasi pengeluaran hanya memiliki sedikit potensi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Eropa tanpa adanya perbaikan dari sisi kelembagaan.

Komponen pajak daerah yang dapat ditingkatkan melalui penerimaan di sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Penguatan basis data pajak daerah yang berdasarkan domisili wajib pajak dan perusahaan yang melakukan investasi di daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui ekstensifikasi pajak daerah dengan cara memberikan insentif fiskal melalui keringanan beban tarif pajak daerah. Hasil analisis ini berbeda dengan hasil analisis yang dilakukan oleh (Korotun et al., 2020) yang menyatakan bahwa desentralisasi pendapatan dan otonomi pajak berdampak buruk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

2. Hubungan Antara Investasi Daerah Terhadap PBBKB

Pertumbuhan penerimaan PBBKB juga didukung atas kinerja investasi langsung daerah Provinsi Sumatera Selatan, hal ini mengindikasikan hasil estimasi *Fixed Effect Model* dalam penelitian ini bahwa investasi langsung ke daerah memberikan dampak positif signifikan terhadap penerimaan PBBKB. Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan PBBKB tidak terlepas dari kontribusi peran sektor swasta dalam penanaman modal untuk investasi sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sektor unggulan yang menjadi daya saing untuk calon investor melakukan investasinya di Provinsi Sumatera Selatan antara lain dari Sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan serta Pariwisata. Hasil analisa ini sejalan dengan analisa terdahulu oleh (Manasseh et al., 2023) yang menyatakan bahwa pemerintah harus memperkenalkan kebijakan dan insentif pajak baru untuk menarik lebih banyak jenis penanaman modal asing yang memberikan menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Namun hasil analisa ini belum sejalan dengan hasil analisis oleh (Tvaronaviciene et al., 2023).

Investasi langsung ke daerah dapat meningkatkan konsumsi barang dan jasa dalam negeri khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh manfaat dari investasi tersebut. Pemerintah daerah harus melihat potensi investasi daerah yang bisa dikembangkan dan memberikan dampak pertumbuhan bagi daerah. Bahwa kontribusi PDRB lapangan usaha terbesar berada pada pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta kegiatan konstruksi memberikan peluang investasi untuk meningkatkan produktivitas konsumsi barang dan jasa.

3. Hubungan Antara Suku Bunga Terhadap PBBKB

Hasil dari estimasi dalam *Fixed Effect Model* analisa ini mengindikasikan bahwa penurunan tingkat suku bunga akan meningkatkan penerimaan PBBKB dan sejalan dengan pandangan yang sama dengan hasil analisis oleh (Soharwardi et al., 2022). Namun hasil analisa ini belum sejalan dengan pandangan (Evemy et al., 2024) yang menyatakan bahwa kebijakan moneter mungkin telah

memperburuk kondisi Inggris masalah produktivitas dengan memfasilitasi ekspansif atas produktivitas meningkatkan strategi investasi.

Investasi daerah telah memberikan dampak positif terhadap penerimaan PBBKB, namun pemerintah daerah perlu melakukan mitigasi risiko terhadap dampak negatif yang ditimbulkan yang perlu diantisipasi yaitu pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi harus dikendalikan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi (Khan & Khan, 2023). Kenaikan konsumsi barang dan jasa sebagai akibat peningkatan investasi daerah telah memicu kenaikan inflasi akibat tarikan permintaan. Pemerintah daerah harus melihat gejala inflasi ini dan melakukan kolaborasi dengan otoritas perwakilan Bank Indonesia untuk mengendalikan tingkat suku bunga acuan. Pengendalian suku bunga dalam kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi agar tercapai keseimbangan di pasar produk dan di pasar uang.

Ketika tingkat suku bunga diturunkan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bagi kreditur untuk tujuan konsumsi, investasi dan berusaha sehingga pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya. Terutama suku bunga untuk bantuan kredit modal usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah sehingga dapat memberikan stimulus industri rumah tangga skala kecil. Ketimpangan kesempatan dan kewirausahaan adalah lebih kuat untuk wirausaha dibandingkan skala yang lebih besar bagi perusahaan swasta serta kualitas pembangunan ekonomi, struktur ekonomi dan pelayanan publik merupakan faktor penting yang mempengaruhi korelasi antara ketimpangan kesempatan dan kegiatan kewirausahaan (Zhou & Liu, 2024).



BAB V

KESIMPULAN

I. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada BAB IV serta model yang terbentuk, untuk penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh:

1. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang diproxy dengan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan hubungan positif signifikan dalam model terhadap penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, hal ini mengindikasikan bahwa konsumsi barang dan jasa sebagai pembentuk PDRB dapat meningkatkan konsumsi penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Aktivitas perekonomian yang banyak mengkonsumsi bahan bakar kendaraan bermotor, antara lain aktivitas industri, industri rumah tangga, kegiatan pertambangan dan penggalian, aktivitas rumah tangga. Potensi sumber daya alam Sumatera Selatan yang banyak, antara lain dari pertambangan dan penggalian mengindikasikan adanya konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor untuk aktivitas dan kapasitas produksi serta kegiatan pengangkutan transportasi batubara;
2. Peningkatan investasi daerah Sumatera Selatan, baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan kinerja yang positif signifikan dalam model yang dapat meningkatkan penerimaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Adanya investasi masuk ke Sumatera Selatan akan meningkatkan konsumsi barang dan jasa sehingga dapat

meningkatkan kapasitas produksi perusahaan penanaman modal. Peningkatan kapasitas produksi ini memerlukan konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;

3. Hasil model yang terbentuk bahwa terdapat hubungan yang negatif signifikan antara kinerja suku bunga dengan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Ketika kebijakan moneter Bank Indonesia yang menurunkan tingkat suku bunga bank komersil, maka akan mendorong pihak lain untuk melakukan investasi. Tingkat suku bunga yang turun memiliki kecenderungan orang akan menarik uangnya di bank dan melakukan investasi atau usaha. Dengan adanya peningkatan investasi atau peningkatan usaha, maka konsumsi akan bahan bakar kendaraan bermotor juga meningkat seiring dengan kapasitas produksi yang meningkat.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001

DAFTAR REFERENSI



- Bista, R. B., & Basnet, P. (2022). Measuring Determinants of Time Deposit in The Commercial Banks in Nepal. *Quantitative Economics and Management Studies*, 3(1), 21–33. <https://doi.org/10.35877/454ri.qems721>
- Evemy, J., Berry, C., & Yates, E. (2024). Low interest rates, low productivity, low growth? A multi-sector case study of UK-based firms' funding and investment strategies in the context of loose monetary policy. *New Political Economy*, 29(2), 240–259. <https://doi.org/10.1080/13563467.2023.2240237>
- Giorkhelidze, D. (2024). Modern Analyses of Macroeconomic Indices for Medium and Long Term Plans in Georgia. *European Scientific Journal, ESJ*, 20(37), 26. <https://doi.org/10.19044/esj.2024.v20n37p26>
- Hang, M., & Pham, P. (2025). *FISCAL DECENTRALIZATION : THE CASE OF VIETNAM*. 5, 106–130. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2025-0-5-106-130>
- Hung, N. T., & Thanh, S. D. (2022). Fiscal decentralization , economic growth , and human development : Empirical evidence Fiscal decentralization , economic growth , and human development : Empirical evidence. *Cogent Economics & Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2109279>
- Javeed Iqbal, Shazia Khalid, & Muhammad Tariq. (2024). The Impact of Tax Collection and Domestic Entrepreneurial Business Ventures on Services Sector in Pakistan: An ARDL Bound Test Approach. *Journal of Entrepreneurship and Business Venturing*, 4(1). <https://doi.org/10.56536/jebv.v4i1.84>
- Kaneva, T., Karpenko, M., Nasibova, O., Tabenska, J., & Tomniuk, T. (2023). FISCAL DECENTRALIZATION INFLUENCE ON PUBLIC SERVICES EFFICIENCY AND ECONOMIC GROWTH. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*, 5(52), 68–78. <https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.52.2023.4193>
- Keita, O., & Yu, B. (2021). Impact of Foreign Direct Investment on Welfare in Africa: Empirical Evidence from Guinea. *Journal of Economic Science Research*, 4(3). <https://doi.org/10.30564/jesr.v4i3.3147>
- Khan, Z., & Khan, M. A. (2023). The Effect of Monetary Policy on Income Inequality:

- Empirical Evidence from Asian and African Developing Economies. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 12(3), 133–158. <https://doi.org/10.2478/jcbtp-2023-0028>
- Kiruthik Srinivaas, G. K., Bagla, P., Kabra, V., Mathur, M., & Mehta, S. (n.d.). *Macroeconomic Determinants of Tax Revenues of South African Countries*. www.ijfmr.com
- Korotun, V., Kaneva, T., Drepin, A., Levaieva, L., & Kucherenko, S. (2020). The impact of fiscal decentralization on economic growth in central and eastern Europe. *European Journal of Sustainable Development*, 9(3), 215–227. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n3p215>
- Manasseh, C. O., Nwakoby, I. C., Okanya, O. C., Ifediora, C. U., & Nzidee, W. A. (2023). The Impact of Foreign Direct Investment and Oil Revenue on Economic Growth in Nigeria. *Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Economics Series*, 33(3), 61–85. <https://doi.org/10.2478/sues-2023-0014>
- Muringani, J., Dahl Fitjar, R., & Rodríguez-Pose, A. (n.d.). *Decentralisation, quality of government and economic growth* Descentralización, caliDaD De gobierno y crecimiento económico.
- Nizam, N. S. K., Safian, S. S., Jamaludin, S., & Osman, A. A. (2024). The Effect of Inflation and Interest Rate on Consumer Spending: Empirical Evidence from Malaysia. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 11(2.2), 1–26. <https://doi.org/10.14738/assrj.112.2.16399>
- Ren, H., Xian, Z., Zhu, B., & Lin, H. (2025). Fiscal decentralization and regional Innovation: Dual mechanisms of human capital mediation and financial development moderation. *International Review of Economics and Finance*, 102(July), 104370. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104370>
- Sima, M., Liang, P., & Qingjie, Z. (2023). The impact of fiscal decentralization on economic growth: A comparative analysis of selected African and OECD countries. *Heliyon*, 9(9), e19520. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19520>
- Soharwardi, M. A., Sarwar, J., Khan, M. I., & Miraj, M. (2022). Fiscal and Monetary Policy Dilemma in Pakistan to Support Economic Growth. *Journal of Economic Impact*, 4(3), 233–243. <https://doi.org/10.52223/jei4032210>
- Stawska, J., & Miszczyńska, K. (2022). *ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES THE IMPACT OF MONETARY AND FISCAL POLICY VARIABLES ON THE EU ECONOMIC GROWTH. PANEL DATA ANALYSIS * ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES*. 9(4). [https://doi.org/10.9770/jesi.2022.9.4\(20\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2022.9.4(20))
- Sugiyarto, A., Lee, B. L., & Wilson, C. (2025). Narrowing the gap : Dynamics of Indonesia ' s public expenditure performance in economically lagging districts. *Economic Analysis and Policy*, 85(March), 2299–2318.

<https://doi.org/10.1016/j.eap.2025.03.014>

- Tvaronaviciene, M., Simelyte, A., & Stirblyte, G. (2023). The Impact of Foreign Direct Investment from the Nordic Countries on the Structure of Lithuania's Economy. *Marketing and Management of Innovations*, 14(4), 112–127. <https://doi.org/10.21272/mmi.2023.4-08>
- Wang, Y., Huang, X., Zhang, T., Jiang, B., & Wang, X. (2024). Impact of fiscal decentralization and local government competition on the supply of basic public services: Based on the empirical evidence of prefecture-level cities in China. *Heliyon*, 10(4), e26511. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26511>
- Wawrosz, P., & Traksel, S. (2023). Negative Interest Rates and Its Impact on GDP, FDI and Banks' Financial Performance: The Cases of Switzerland and Sweden. *International Journal of Financial Studies*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/ijfs11020069>
- Zhou, G., & Liu, L. (2024). The effect of inequality of opportunity on entrepreneurship: Evidence from China. *World Economy*, 47(6), 2264–2286. <https://doi.org/10.1111/twec.13543>